

Intisari

Hampir empat tahun sejak penyerangan pertama pada 29 Desember 2011 konflik Syi'ah Sampang tidak terselesaikan, pasca penyerangan kedua pada 26 Agustus 2012 kelompok Syi'ah dipaksa meninggalkan kampung halaman ke tempat pengungsian. Sampai saat ini pemerintah pusat hingga daerah belum mampu memulangkan seluruh anggota kelompok Syi'ah ke kampung halamannya. Maka muncul satu rumusan masalah: Bagaimana dinamika konflik Syi'ah Sampang dan kegagalan upaya rekonsiliasi? ditunjang dua sub bab rumusan masalah (a) Bagaimana kebijakan pemerintah mengenai upaya rekonsiliasi serta implikasinya? (b) Bagaimana respon Ulama terhadap konflik dan upaya rekonsiliasi serta implikasinya?

Metode riset menggunakan kualitatif dengan pilihan studi kasus untuk melihat dinamika konflik, kegagalan upaya rekonsiliasi serta berbagai kebijakan pemerintah pusat hingga daerah dan respon kalangan Ulama dalam upaya rekonsiliasi. Merujuk Fisher (2001:4) analisa konflik dapat diidentifikasi melalui mencari penyebab-penyebab konflik, mengidentifikasi isu, pemetaan aktor serta tahapan konflik. Penyebab konflik, pertama ditenggarai perbedaan madzhab diinternal Bani Makmun, kedua perebutan hak waris tanah di internal Bani Makmun, ketiga terancamnya keamanan keberadaan Tajul dan kelompok Syi'ah, ke empat faktor politik, terakhir persoalan identitas. Selain itu, pemicu konflik disebabkan beredarnya isu-isu di ranah sosial. Pertama isu perebutan pengaruh sosial, kedua penodaan agama, ketiga adanya elit local yang ditenggarai senang melakukan poligami. Pemetaan aktor konflik dipetakan yakni perselisihan antara Tajul dan kelompoknya dengan Roies dan masyarakat Karanggayam yang mendapatkan dukungan organisasi Ulama seperti MUI, PCNU dan Bassra Sampang. Tahapan konflik Syi'ah dapat dipotret jelas ketika tahun 2004-2013 pasca wafatnya Kiai Makmun. Ketika itu Tajul dan kelompoknya mengajarkan faham/ajaran Syi'ah secara terbuka. Hingga tahun 2013 memasuki pasca konflik, anggota kelompok Syi'ah direlokasi ke luar Madura. Terjadi 4 kali pertemuan dalam upaya rekonsiliasi, dimulai 29 Oktober 2009 sampai terakhir tanggal 26 Agustus 2013. Merujuk Lederach (1997:30) rekonsiliasi merupakan lokus, pertemuan pihak-pihak berkonflik, menekankan rasa kebenaran, belas kasih, keadilan dan sifat-sifat perdamaian.

Semua kebijakan dan respon Ulama dalam upaya rekonsiliasi tidak mengacu pada konsep Fisher dan Lederach. Implikasinya terjadi perdamaian negatif serta kekerasan struktural dan kultural. Setidaknya terdapat dua kekerasan struktural yang dilakukan pemerintah, pertama kategori kesejahteraan dan kedua kategori kemerdekaan. Kekerasan kategori kesejahteraan yakni pemerintah tidak dapat mempekerjakan anggota kelompok Syi'ah sebagai petani di Desa Karanggayam karena biasanya mereka mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian dan perdagangan hewan ternak. Kemudian mereka tidak dapat berkumpul bersama keluarganya di Desa Karanggayam. Kategori kekerasan struktural kemerdekaan muncul karena pemerintah secara paksa mengungsikan semua anggota kelompok Syi'ah ke Jemundo, Sidoarjo. Merampas hak-haknya sebagai warga sipil Desa Karanggayam. Adapun imbas dari respon Ulama terdapat dua jenis kekerasan, pertama kekerasan kultural agama dan kekerasan kultural ideologi. Kekerasan kultural agama muncul karena Syi'ah dianggap sesat dan menyesatkan oleh kalangan Ulama. Kedua kekerasan kultural ideologi. Masyarakat dan Kiai Karanggayam melarang, tidak memberikan kesempatan ideologi Syi'ah berkembang di daerah Karanggayam lebih luasnya Sampang.

Kata Kunci: Konflik Syi'ah Sampang, Rekonsiliasi, Kebijakan pemerintah, Respon Ulama.

Abstract

Nearly four years since the first attack on December 29, 2011 Sampang Syi'ah conflict is not resolved, after the second attack on August 26, 2012 Syi'ahs forced to abandon their homes to places of refuge. Until now the central government to the regions have not been able to repatriate all members of the Syi'ah group to the village. Then came the formulation of the problem: How do the dynamics of conflict and the failure Sampang Syi'ah reconciliation efforts? supported two sub-chapters formulation of the problem (a) How is the government's policy on reconciliation efforts as well as the implications? (b) How Ulama response to conflict and reconciliation efforts as well as the implications?

Using qualitative research methods with a selection of case studies to look at the dynamics of conflict, the failure of reconciliation as well as the various policies of the central government to the regions and the response of the Ulama in reconciliation efforts. Referring Fisher (2001: 4) analysis of the conflict can be identified through the search for the causes of conflict, identifying issues, mapping the actors as well as the stages of the conflict. In addition, due to the release of the trigger conflict issues in the social domain. The first issue of the struggle for social influence, both blasphemy, third the local elite who allegedly enjoyed doing polygamy. Mapping mapped the conflict actors dispute between Tajul and his group with the Karanggayam Roies and community support organizations such as the MUI, PCNU and Bassra Sampang. Syi'ah conflict phases can be photographed clearly when the years 2004-2013 after the death of Kiai Ma'mun. When it Tajul and his group teach the ideology /doctrine Syi'ah openly. Until after the conflict in 2013 when the Syi'ah group relocated to the outside of Madura. 4 meetings occurred in reconciliation efforts, begun 29 Oktober 2009 until last August 26, 2013. Referring to Lederach (1997: 30) is the locus of reconciliation, gathering the parties in conflict, emphasizing a sense of truth, compassion, justice and peace properties. All policies and responses Ulama in reconciliation efforts did not refer to the concept of Fisher and Lederach. implications occurs negative peacekeeping, structural and cultural violence. There are at least two structural violence by the government, the first category of well-being and independence of these two categories. Violence welfare category that the government can not employ members of the Syi'ah group as a farmer in the village Karanggayam because usually they earn income from agriculture and livestock trade. Then they can not get together with his family in the village of Karanggayam. Categories of structural violence of independence arises because the government forcibly evacuated all members of the Syi'ah group to Jemundo, Sidoarjo. Robbed of their rights as civilians Karanggayam village. As for the impact of the response Ulama there are two types of violence, the first violence of religious and cultural ideology of cultural violence. The violence comes as Syi'ah religious cultural considered deviant and misled by the Ulama. Both cultural violence ideology. Society and Kiai Karanggayam forbid, do not give the opportunity Syi'ah ideology developed in the region over the breadth Karanggayam Sampang.

Keywords: Sampang Syi'ah Conflict, Reconciliation, Government policy, Response Ulama